

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penelitian

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Selama kemerdekaannya, Indonesia telah mengalami pasang surut dalam sektor perekonomiannya. Pengalaman Indonesia saat terjadi krisis (krisis keuangan Asia) pada 1998 lalu yang mengakibatkan runtuhnya banyak perusahaan raksasa, baik nasional maupun multinasional menyadarkan kita bahwa perekonomian Indonesia sangat bergantung pada kondisi perekonomian dunia dan barang-barang import. Namun dibalik kenyataan pahit tersebut, kita juga menyadari satu hal lainnya. Ternyata usaha-usaha kecil menengah (UMKM) mampu bertahan bahkan meraup keuntungan dari kondisi tersebut. UMKM ternyata mampu menyelamatkan perekonomian bangsa yang morat-marit pada saat itu. Hal ini juga merupakan bukti bahwa kekuatan masyarakat apabila diberdayakan sesuai potensi dan peranannya akan menjadi kekuatan yang besar dan tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan globalisasi yang semakin berat, pemberdayaan masyarakat adalah langkah yang sangat tepat.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang lemah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini meliputi kelemahan dalam pengetahuan, kemampuan, pengalaman, sikap, modal usaha, jaringan dan mitra, semangat, kerja keras, ketekunan, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Ketidakberdayaan ini menyebabkan

masyarakat tidak mandiri, tidak berdaya, dan jatuh dalam lubang kemiskinan yang dalam.¹

Pemberdayaan masyarakat adalah mempersiapkan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.²

Menurut Slamet pemberdayaan masyarakat yaitu bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Maksud dari mampu disini adalah berdaya, paham, termotivasi, memiliki peluang, melihatnya dan memanfaatkannya, berenergi, mampu bekerjasama, berpengetahuan, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai inisiatif.³

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.⁴

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat

¹ Ajeng Dini Utami, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Temanggung, Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019) 19

² Ajeng Dini Utami, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 20

³ Dr. Oos M. Anwas, 2014, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung. Hlm. 50

⁴ Hendrik Yasin, “Upaya Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)”, *Gorontalo, Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 1 (2015) 39. Diakses pada 01 Januari 2020. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pemberdayaan+masyarakat+dalam+bidang+ekonomi+untuk+mewujudkan+ekonomi&btnG=#d=gs

mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara. Tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah pulihnya nilai-nilai manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang unik, merdeka, dan mandiri. *Unik* dalam konteks kemajemukan manusia, *merdeka* dari segala belenggu internal maupun eksternal termasuk belenggu keduniawian dan kemiskinan serta *mandiri* untuk mampu menjadi programmer bagi dirinya dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesama.⁵

Pemberdayaan akan berhasil jika pemerintah menitikberatkan pembangunan pada proses bukan hasil. Kunci keberhasilan pemberdayaan terletak pada seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh rakyat. Semakin besar partisipasi rakyat, maka semakin berhasil pula kegiatan pemberdayaan tersebut. Dengan demikian, pemberdayaan pada hakikatnya adalah pembangunan komunitas yang berdaya, bukan semata-mata pembangunan individu. Pemberdayaan harus dilakukan dengan disertai partisipasi aktif masyarakat didalamnya, baik secara fisik, mental, dan manfaat yang diperoleh oleh individu atau masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan di Indonesia sering kali diidentikkan dengan peningkatan manfaat secara ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan menyejahterakan masyarakat. Pemberdayaan yang demikian itu tidak bisa dilakukan hanya dengan meningkatkan pendapatan, tetapi juga harus dipahami secara menyeluruh tidak patah-patah atau hanya terkonsentrasi pada satu bagian saja. Pemberdayaan harus melihat semua aspek kehidupan manusia, seperti gizi dan fasilitas kesehatan, tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, ketersediaan

⁵ Erni Febrina Harahap, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri", Padang, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 3 No. 2 Mei (2012) 79

lapangan kerja, jumlah keluarga dan anggotanya, dan lain-lain. Pemberdayaan juga tidak bisa dilakukan secara persial, melainkan harus sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.⁶

Dalam Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa, pada Bab XIV Pasal 112 ayat 3 disebutkan bahwa, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat melalui tiga hal, yaitu:

- a. Menetapkan hasil pengembangan IPTEK dan penemuan baru lainnya yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan ekonomi masyarakat desa.
- b. Meningkatkan kualitas pemerintah dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli/yang sudah ada di desa.⁷

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memajukan desa melakukan aksi kolektif sebagai satu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat, serta kesatuan ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat rakyat desa dilaksanakan oleh seluruh elemen pemerintahan, mulai dari pusat hingga kecamatan, serta lembaga-lembaga formal desa, seperti BPD, forum musyawarah desa, lembaga adat desa, BUM Desa, dan kelompok masyarakat lainnya yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Selain itu, peran dari dunia usaha dan media massa juga diperlukan agar pemberdayaan bisa berlangsung dengan transparan dan akuntabel.⁸

⁶ Ajeng Dini Utami, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 21

⁷ UU No.6/2014 Tentang Desa, BAB XIV Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 112 ayat 3

⁸ Ajeng Dini Utami, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 22

b. Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk pemihakan, penyiapan, dan perlindungan bagi rakyat dalam rangka pembangunan kualitas hidup yang lebih baik sehingga kesejahteraan dapat terwujud. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu menghasilkan produk dan mendapatkan manfaat dari produk yang mereka hasilkan. Dalam melaksanakan program pemberdayaan harus berpedoman pada prinsip-prinsip pemberdayaan, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, bakat, masalah, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Untuk unsur-unsur yang bersifat pemaksaan harus dihindari karena pemaksaan bukan ciri dari pemberdayaan.⁹
2. Kegiatan pemberdayaan dilandaskan pada kebutuhan, masalah dan potensi *klien/* sasaran. Hakikatnya setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada saran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri. Proses pemberdayaan juga dituntut berorientasi kepada kebutuhan dan potensi yang dimiliki sasaran. Biasanya pada masyarakat pedesaan yang masih tinggal dan belum terbuka pada perubahan, aspek kebutuhan, masalah, dan potensi tidak nampak di permukaan. Agen pemberdayaan perlu melakukan observasi secara tepat dan akurat. Dalam hal ini,

⁹ Ajeng Dini Utami, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 37

agen pemberdayaan perlu memiliki potensi untuk memahami potensi dan kebutuhan klien/ sasaran.

3. Sasaran pemberdayaan merupakan subyek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan
4. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti sifat gotong royong, kerjasama, musyawarah mufakat, dan kearifan lokal lainnya yang merupakan bagian dari jati diri masyarakat perlu ditumbuh kembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.
5. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan ini dilakukan secara logis mulai dari hal-hal yang sederhana hingga hal-hal yang kompleks.
6. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
7. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.¹⁰

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*)
 Dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan

¹⁰ Ajeng Dini Utami, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 38

melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

2. Perbaikan aksesibilitas (*better accesibility*)
 Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan (*better action*)
 Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)
 Dengan perbaikan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.
5. Perbaikan usaha (*better business*)
 Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
6. Perbaikan pendapatan (*better income*)
 Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan dan masyarakatnya.
7. Perbaikan lingkungan (*better environment*)
 Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

8. Perbaiki kehidupan (*better living*)
Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat
9. Perbaiki masyarakat (*better community*)
Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.¹¹

d. Strategi Pelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Berikut ini beberapa strategi dalam rangka mendukung pelembagaan bagi program pemberdayaan masyarakat:

1. Penguatan kelembagaan lokal.

Dalam sebuah program tersebut harus dibangun kelembagaan lokal yang kuat sebagai mata rantai yang akan melanjutkan kegiatan pemberdayaan yang sudah dilakukan melalui stimulan dari pihak luar tersebut. Karena kelembagaan lokal yang kuat akan memelihara kesinambungan dan manfaat program tersebut. Penguatan kelembagaan lokal dapat dilaksanakan melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola program tersebut, pembangunan sarana fisik kelembagaan dan pendanaan yang permanen. Penguatan dan pembangunan sumberdaya manusia, misalnya, melalui pelatihan manajemen dan kepemimpinan, administrasi keuangan, pemasaran dan lobby serta keterampilan-keterampilan lainnya.

2. Membina kader masyarakat.

Kader masyarakat biasanya dibentuk bersamaan dengan perencanaan dan pelaksanaan program. Mereka inilah ujung tombak yang akan meneruskan program tersebut setelah masa

¹¹ Totok Mardikanto dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta cv, 2015), 111-112

penghapusan “jejak” dari pihak luar yang membantunya. Pembinaan kader masyarakat yang profesional dan cakap adalah bentuk tanggung jawab dari pemberi program untuk mewujudkan kemanfaatan yang berjangka panjang tersebut. Pada tahap pelembagaan, aspek pembinaan kader masyarakat merupakan hal yang penting dilakukan sebagai upaya membangun dampak yang berjangka lama dari program tersebut.¹²

3. Sumber pendanaan

Sumber pendanaan bagi program tersebut yang tidak hanya bergantung pada pemberian dari pihak luar yang sifat sementara dan tidak permanen. Tetapi mekanisme pendanaan ini harus dibuat secara permanen, oleh karena itu model-model pendanaan alternatif harus dibuat selama program tersebut dilaksanakan. Misalnya, dalam kasus Program Transaksi Hulu-Hilir di wilayah di DAS Cidanau, disepakati pemberian dana kompensasi dari pihak hilir (PT: Krakatau Tirta Industri) sebagai pemanfaatan dari air masyarakat di hulu agar memelihara kelestarian lingkungan di daerah hulu sehingga air itu dapat tersedia dan mengalir. Model-model seperti inilah yang dapat diharapkan membangun pendanaan program setelah “pemberian dana” dari luar dihentikan karena sifatnya yang sementara dan stimulan belaka.¹³

2. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi

Konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

¹² Muhtadi, Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, (Banten: UIN Jakarta Press, 2013) 51

¹³ Muhtadi, Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, (Banten: UIN Jakarta Press, 2013) 52

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan.
- c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke mandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya. (2) penguatan kelembagaan. (3) penguasaan teknologi. (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang era tantara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal). (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*. (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan. (4)

penguatan industri kecil. (5) mendorong munculnya wirausaha baru, dan (6) pemerataan spasial.

- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha. (2) peningkatan akses pengembangan SDM. Dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.¹⁴

3. Pemberdayaan Sebagai Proses Perubahan Sosial

Pemberdayaan tidak sekedar merupakan proses perubahan perilaku pada diri seseorang, tetapi merupakan proses perubahan sosial, yang mencakup banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya.

Yang dimaksud perubahan sosial disini adalah, tidak saja perubahan (perilaku) yang berlangsung pada diri seseorang, tetapi juga perubahan-perubahan hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk struktur, nilai-nilai, dan pranata sosialnya, seperti demokratisasi, transparansi, supremasi hukum, dll.

Sejalan dengan pemahaman tentang pemberdayaan sebagai proses perubahan sosial yang dikemukakan diatas, pemberdayaan juga sering disebut sebagai proses rekayasa sosial (social engineerig) atau segala upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumberdaya manusia agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosialnya masing- masing.¹⁵

¹⁴ Erni Febrina Harahapdkk, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri”, Padang, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 3 No. 2 Mei (2012) 86-87. Diakses pada 22 Januari 2020

¹⁵ Totok Mardikanto dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta cv, 2015), 73

Karena kegiatan rekayasa-sosial dilakukan oleh “pihak luar”, maka rekayasa sosial bertujuan untuk terwujudnya proses perubahan sosial demi terciptanya kondisi sosial yang diinginkan oleh pihak luar (perekayasa). Pemahaman seperti itu tidak salah, tetapi tidak dapat sepenuhnya dapat diterima. Sebab rekayasa-sosial yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan kelompok sasarannya, seringkali dapat berakibat negatif, manakala hanya mengacu kepada kepentingan perekayasa, sementara masyarakat dijadikan korban pemenuhan kehendak perekayasa.

4. Pengertian Pariwisata

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya.¹⁶

Pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia di dalam mencari sesuatu yang belum

¹⁶ Gamal Suwanto, “Dasar-dasar Pariwisata”, (yogyakarta: ANDI , 2004), 3-4

diketuainya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapat perjalanan baru. Pariwisata telah dimulai sejak dimulainya peradaban manusia itu sendiri, ditandai oleh adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah dan perjalanan agama lainnya. Sebagai fenomena modern, tonggak-tonggak bersejarah dalam pariwisata dapat ditelusuri dari perjalanan Marcopolo (1254-1324) yang menjelajahi Eropah, sampai ke Tiongkok, untuk kemudian kembali ke Venesia, yang kemudia disusul perjalanan pangeran Henry (1394-1460), Cristopher Colombus (1451-1506) dan Vasco Gama (akhir abad XV). Namun, sebagai kegiatan ekonomi, pariwisata baru berkembang pada awal abad 19, dan sebagai industri internasional pariwisata dimulai tahun 1869.¹⁷

Pariwisata telah menjadi salah satu industri andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Pariwisata memang cukup menjanjikan sebagai primadona ‘ekspor’ karena beberapa ciri positifnya. Dalam suasana dimana terjadi kelesuan perdagangan komoditas, ternyata pariwisata tetap mampu menunjukkan trend-nya yang meningkat secara terus-menerus. Data perkembangan pariwisata dunia menunjukkan bahwa saat terjadinya krisis minyak tahun 1970-an, maupun pada saat terjadinya resesi dunia awal tahun 1980-an, pariwisata dunia tetap melaju, baik dilihat dari jumlah wisatawan internasional maupun penerimaan devisa dari sektor pariwisata ini.¹⁸

a. Macam-macam bentuk wisata:

1. *Holiday Tour* (wisata liburan) yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan dan diikuti oleh anggotanya guna berlibur bersenang-senang dan menghibur diri.
2. *Familiarization Tour* (wisata pengenalan) yaitu suatu perjalanan anjungsana yang dimasukkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang

¹⁷ Gamal Suwanto, “Dasar-dasar Pariwisata, 05

¹⁸ Gde Pitana, Putu G. Gayati “Sosiologi Pariwisata”, (Yogyakarta: ANDI, 2005) 40-42

mempunyai kaitan dengan pekerjaannya. Misalnya, sebuah biro perjalanan luar negeri menyelenggarakan perjalanan wisata bagi karyawan-karyawannya ke Indonesia guna mengenal lebih lanjut objek-objek wisata yang ada di Indonesia agar nantinya mereka dapat memberikan informasi yang lebih baik mengenai Indonesia.¹⁹

3. *Education Tour* (wisata pendidikan) yaitu suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, studi perbandingan ataupun pengetahuan mengenai bidang kerja yang dikunjunginya. Wisata jenis ini disebut juga sebagai study tour atau perjalanan kunjungan pengetahuan.
4. *Scientific Tour* (wisata pengetahuan) yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Misalnya, kunjungan wisata melihat bunga bangkai berbunga (*faflesia arnoldi*), melihat gerhana matahari total, penyelidikan kehidupan komodo, dan lain-lain.
5. *Pileimage Tour* (wisata keagamaan) yaitu perjalanan wisata yang dimaksudkan guna melakukan ibadah keagamaan, misalnya perjalanan Umroh oleh sebuah Konsorsium Biro Perjalanan PATANU (Pantravel Tunas Indonesia dan Natrabu), taour ke Laurdres di Perancis Selatan, dan lain-lain.
6. *Special mission Tour* (wisata kunjungan khusus) yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya misi dagang, misi kesenian, dan lain-lain.
7. *Special Programe Tour* (wisata program khusus) yaitu suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan khusus, misalnya Ladies Programme, suatu kunjungan ke suatu objek wisata

¹⁹ Gamal Suwantoro, "Dasar-dasar Pariwisata, 15

oleh para isteri atau pasangan yang karena suaminya mengikuti rapat.

8. *Hunting Tour* (wisata perburuan) yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata-mata.²⁰

b. Pariwisata Syariah (wisata keagamaan/religi)

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, Islam selalu menyerukan agar manusia dalam bepergian dan bergerak menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini diungkapkan dalam Al-Qur'an dengan menggunakan bentuk *amr* (perintah). Allah SWT menyerukan kepada manusia agar melakukan perjalanan yang diiringi dengan memperhatikan dan men-*tadabbur* apa yang mereka lihat tersebut. Hal ini berarti bahwa manusia akan mendapatkan nilai plus pada rihlah jika diiringi dengan tadabbur, karena tadabbur akan mengingatkan mereka dengan posisinya sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Jika bukan hanya kesenangan saja yang didapat dari rihlah itu tetapi pahala atau ganjaran dari Allah SWT juga akan diraih.

Urusan seorang muslim bergerak dan berpindah-pindah untuk mendapatkan rezeki, menuntut ilmu, melaksanakan haji atau umroh, menjenguk kawan, menjenguk orang sakit dan sebagainya. Semua kegiatan tersebut bernilai ibadah jika tujuan bepergian dalam rangka mencari ridho Allah semata.²¹

Menurut Dr. Abdul Hakam Ash-Sha'idi dalam bukunya berjudul *Ar-Rihlatu fi Islami*, Islam membagi bepergian atau perjalanan dalam lima kelompok:

²⁰ Gamal Suwanto, "*Dasar-dasar Pariwisata*, 16

²¹ Rahmi Syahriza, "*Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinya dalam al-Qur'an)*", Sumatera Utara, Jurnal Human Falah, Vol. 1 No. 2 Desember (2014) 137. Diakses pada 10 Januari 2020. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+pariwisata+berbasis+syariah+&btnG=#d=gs

1. Bepergian untuk mencari keselamatan seperti hijrah yaitu keluar dari negara yang penuh bid'ah atau dominasi haram.
2. Bepergian untuk tujuan keagamaan seperti menuntut ilmu, ibadah haji, jihad di jalan Allah, berziarah ke tempat-tempat mulia mengunjungi kerabat atau saudara karena Allah, dan bepergian untuk mengambil ibrah atau menegakkan kebenaran dan keadilan.
3. Bepergian untuk kemaslahatan duniawi seperti mencari kebutuhan hidup, mencari nafkah.
4. Bepergian karena urusan kemasyarakatan seperti menengahi pertikaian menyampaikan dakwah, bermusyawarah.
5. Bepergian untuk kepentingan turisme atau kesenangan semata.²²

Diriwayatkan oleh Ibnu Hanil dari Ahmad bin Hanbal, beliau ditanya tentang seseorang yang bepergian atau bermukim disuatu kota mana yang lebih anda sukai? Beliau menjawab: “wisata tidak ada sedikitpun dalam Islam, tidak juga perilaku nabi dan orang-orang saleh.”²³

Ibnu Rajab mengomentari perkataan Imam Ahmad ini dengan mengatakan: “wisata dengan pemahaman ini yelah dilakukan oleh sekelompok orang yang dikenal suka beribadah dan bersungguh-sungguh tanpa disadari ilmu. Diantara mereka ada yang kembali ketika mengetahui hal itu.”²⁴ Kemudian Islam datang untuk meninggikan

²² Rahmi Syahriza, “Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinya dalam al-Qur'an)”, Sumatera Utara, Jurnal Human Falah, Vol. 1 No. 2 Desember (2014) 139. Diakses pada 10 Januari 2020

²³ Abu al-Fida' Ismail, Ibn Katsir, *Tafsir Al-quran Al-Azhim*, (Beirut: Muassisah al-Mukhtar, 2002) 102

²⁴ Abu al-Fida' Ismail, Ibn Katsir, *Tafsir Al-quran Al-Azhim*, (Beirut: Muassisah al-Mukhtar, 2002) 105

pemahaman wisata dengan mengaitkannya dengan tujuan-tujuan yang mulia, diantaranya:

1. Mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar atau wisata untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yang haji pada bulan-bulan tertentu dan umrah.
2. Dalam pemahaman Islam, wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan. Pada permulaan Islam, telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya.
3. Wisata dalam rangka berdakwah kepada Allah SWT Ta'ala seperti yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul yang telah menyebar keujung dunia untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajak mereka kepada kalimat yang benar.
4. Wisata dalam rangka mengambil pelajaran dan peringatan. Dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat (al-An'am: 11 dan al-Naml: 69).²⁵
5. Safar atau wisata untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta'ala, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap ke Esaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup sebagaimana disebutkan Allah dalam surat al-Ankabut: 20.²⁶

Wisata ini merupakan salah satu wisata yang berkaitan erat dengan sisi religus atau keagamaan yang di anut oleh masyarakat, yang di tandai dengan kegiatan berziarah. Wisata religi mempunyai berbagai kelebihan diantaranya dijadikan sebagai tempat ibadah (berupa peninggalan masjid), tempat berdoa bagi masyarakat.

²⁵ Alquran, Al-An'am ayat 11, Al-Naml ayat 69, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Penerbit Diponegoro, 2005) 103, 305

²⁶ Alquran, Al-Ankabut ayat 20, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Penerbit Diponegoro, 2005) 318

Wisata ini selalu dihubungkan dengan niat dan tujuan dari para wisatawan atau peziarah untuk memperoleh berkah dalam hidupnya dan banyak juga melakukan dengan mendapatkan restu, kekuatan bati maupun kekayaan yang melimpah.

Dengan wisata ini parawisatawan akan memperkaya wawasan dan pengalaman keagamaan serta rasa sepiritual terhadap yang maha kuasa. Terdapat berbagai istilah dalam wisata religi diantaranya orang yang melakukan wisata disebut juga dengan istilah ziarah. Para peziarah melakukan wisata dengan tujuan mendekati diri kepada Allah agar dapat meningkatkan keimanannya, bahwasanya manusia akan mati. Seperti halnya dengan wisata atau kepariwisataan, wisata religi mempunyai tujuan yang penting diantaranya: selain sebagai objek wisata parawisatawan juga dapat mencari berkah dengan cara mendoakan para tokoh yang telah gugur maupun berjasa bagi masyarakat sekitar.

Dengan demikian tentunya ada perbedaan yang diraskan oleh para peziarah sewaktu berangkat, dilokasi maupun setelah pulang dari tempat wisata religi. Para peziarah akan memahami tempat tersebut dikarenakan pada saat di lokasi di jelaskan oleh para ketua rombongan sekilas tentang biografi sosok yang dikunjungi, baik menyangkut sejarah, perjuangan dakwahnya, pengabdian dan napak tilasnya hingga pada saat mendoakannya. Para peziarah akan mengambil hikmah dan mencari berkah dari perjalanan wisata religi tersebut.²⁷

5. Pariwisata Sebagai Sektor Ekonomi Yang Sedang Tumbuh

Aspek ekonomi pariwisata tidak hanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata seperti usaha perhotelan, restoran, dan penyelenggaraan paket wisata. Banyak kegiatan ekonomi lainnya yang

²⁷ Moh Chotib, "Wisata Religi di Kabupaten Jember", *jurnal FENOMENA* Vol. 14 No. 2 (2015), 413 Diakses pada tanggal 21 Januari 2020. <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/fenomena/article/view/223>

berhubungan erat dengan pariwisata seperti transportasi, telekomunikasi, dan isnis eceran.²⁸

Pariwisata di Indonesia telah dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi penting. Bahkan setor ini diharapkan akan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu. Namun dalam situasi demikian muncul pertanyaan: kebijaksanaan mana yang lebih baik, mengikuti cara Nusa Dua atautah pantai Kuta agar kegiatan pariwisata dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang paling banyak bagi negara dan juga bagi masyarakat? Apakah pengembangan kegiatan pariwisata dilakukan disegenap wilayah Indonesia atau hanya di beberapa daerah tertentu yang dianggap paling siap? Sementara ada niat untuk menarik wisatawan dalam jumlah besar, sebelumnya harus disadari bahwa jumlah yang besar dan hanya terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu (*overcrowding*) dapat menurunkan kualitas kehidupan masyarakat yang pada akhirnya justru akan menghilangkan daya tarik daerah tersebut. Juga harus disadari bahwa keindahan lingkungan alam dapat terganggu bila jumlah dan kaulitas perilaku wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut tidak dapat dikendalikan secara efektif.²⁹

Di samping menjadi mesin penggerak ekonomi, pariwisata juga merupakan wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran mengingat berbagai jenis wisata dapat ditempatkan di mana saja (*footlose*). Oleh sebab itu pembangunan wisata dapat dilakukan diderah yang pengaruh penciptaan lapangan kerjanya paling menguntungkan.

Pembangunan pariwisata memerlukan modal. Modal ini dapat berasal dari pemerintah maupun swasta. Dalam situasi di mana pemerintah terpaksa harus bekerja dengan sumber daya yang amat terbatas sangatlah diharapkan pihak swasta dapat berperan lebih besar dengan ikut mendanai pembangunan berbagai prasarana, terutama yang

²⁸ Gamal Suwanto, "*Dasar-dasar Pariwisata*", 35

²⁹ Gamal Suwanto, "*Dasar-dasar Pariwisata*", 36

berkaitan langsung dengan pembangunan objek atau daerah tujuan wisata.³⁰

Bagi investor swasta, keikut-sertaan dalam pembangunan prasarana wisata jelas merupakan beban investasi tersendiri. Namun demikian mereka dapat diberi imbalan yang berupa hak tertentu. Yang harus dicatat adalah bahwa pemberian hak tersebut hendaknya tidak akan mengganggu kepentingan pihak lain. Dengan adanya keikut-sertaan pihak swasta dalam pembangunan prasarana wisata, maka modal publik dapat lebih dipusatkan pada proyek yang dapat menciptakan sinergi bersama-sama dengan yang telah dirintis oleh sektor swasta. Hal ini juga berarti bahwa di masa mendatang dapat diharapkan akan ada kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta.³¹

Kebijakan yang menjamin perlakuan yang tidak membeda-bedakan hendaknya direncanakan dengan cermat dan dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhan dari pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, termasuk hak dan kebutuhan wisatawan dan masyarakat setempat.

Industri pariwisata sering dianggap sebagai jawaban untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi Indonesia. Kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh ekspor non-migas yang menurun, impor yang naik, dan pembangunan ekonomi yang timpang, dipandang akan dapat diatasi dengan industri pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja baru yang jelas akan dapat memberikan lebih banyak peluang ekonomi, disamping juga dapat menjadi sarana untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi regional. Bagi Indonesia di samping diharapkan akan dapat menyumbang neraca pembayaran, pariwisata juga diharapkan akan dapat meningkatkan pengertian internasional, menumbuhkan rasa saling menghormati dan toleransi.

³⁰ Gamal Suwanto, "*Dasar-dasar Pariwisata*", 37

³¹ Gamal Suwanto, "*Dasar-dasar Pariwisata*", 38

Namun demikian harus disadari bahwa kegiatan wisata juga membawa dampak negatif. Pariwisata sering dituding sebagai penyebab macetnya lalu lintas, kerusakan lingkungan, kehancuran warisan budaya bangsa, dan pembawa masuk nilai budaya dan kebiasaan yang negatif.³²

Ada yang berpendapat bahwa kebijakan pariwisata, baik secara nasional maupun daerah, sepertinya dirancang khusus untuk kepentingan operator wisata saja. Kegiatan pariwisata banyak menimbulkan isu kebijaksanaan, yang sering sangat kontroversional, tidaklah dapat diabaikan. Pemerintah harus lebih peka terhadap kebutuhan dan keinginan wisatawan, operator wisata, serta masyarakat dalam menghadapi persengketaan tersebut. Pemerintah harus berupaya menyeimbangkan minat-minat yang bertentangan itu sedemikian rupa sehingga pariwisata dapat benar-benar menjadi usaha ekonomi yang utama, yang mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan secara adil. Hal ini dapat tercapai bila kegiatan pariwisata bersifat ramah terhadap lingkungan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang lebih dahulu dilakukan oleh orang lain yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui persamaan perbedaan yang ada dari penelitian yang diteliti oleh orang lain dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan mengetahui persamaan dan perbedaan dapat menunjukkan orisinalitas penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wisata religi.

Sebelumnya telah banyak peneliti ilmiah yang membahas mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wisata. Pada umumnya objek penelitian yang diteliti memiliki perbedaan masing-masing. Agar dapat mengetahui pembahasan setiap penelitian, membantu peneliti dalam mencapai penelitian ini, juga dapat

³² Gamal Suwanto, "Dasar-dasar Pariwisata", 36

mengetahui penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian selanjutnya dan original, mengandung kebaruan, maka akan peneliti paparkan beberapa penelitian sebelumnya mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Syekh Jangkung Di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati dengan berbagai pandangan sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Anita Sulistiyaning Gunawan, dalam jurnal. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 32 No. 1 (2016), dengan judul "*Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi pada Wisata Religi Gereja Puhsarang Kediri)*". Dalam penelitian ini menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata di dalam pengembangan kawasan obyek Wisata Puhsarang yang ada di kota Kediri. Kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata guna menarik wisatawan untuk berkunjung melalui beberapa cara yaitu melakukan promosi pariwisata melalui pelaku industri pariwisata, pengembangan jaringan kerjasama peomosi pariwisata, pengadaan website pariwisata juga promosi dengan memasang papan reklame. Selain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pihak keuskupan dari Wisata Religi Puhsarang juga melakukan kegiatan promosi untuk lebih mengenalkan daya yang ada di Wisata Religi Puhsarang. Pihak keuskupan melakukan promosi dengan cara menyebar brosur-brosur, lalu lewat media internet juga, akan ada kegiatan rutin yang selalu diadakan yaitu malam jumat legi dan novena dari kegiatan rutin tersebut secara tidak langsung dalah bentuk daya tarik dari Wisata Religi Puhsarang ini. Dengan adanya pengembangan sarana dan prasarana di kawasan Wisata Religi Puhsarang yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri yang bekerjasama dengan pihak Keuskupan Puhsarang membuat meningkatnya jumlah pengunjung yang dayang ke Puhsarang. dengan banyaknya pengunjung yang datang, barang dagangan pedagang pun ikut laku terjual yang dampaknya akan meningkatkan pendapatan ekonomi

masyarakat secara otomatis juga meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat.³³

Hal yang paling mendasar yang membedakan penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan adalah terletak pada obyek dan subyek penelitiannya. Karya skripsi peneliti berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wisata religi di Desa Landoh Kec. Kayen, Kab. Pati, sedangkan artikel Anita Sulistiyaning Gunawan berfokus pada Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi pada Wisata Religi Gereja Puhsarang Kediri) dengan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu tujuan pembahasan masalah juga berbeda dalam penelitian tersebut.

2. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fahrizal Anwar dkk, dalam jurnal. *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol.44 No.1 (2017), dengan judul “*Analisis Dampak Pengembangan Wisata Religi Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim Dalam Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Sekitar (Studi pada Kelurahan Gapurosukolilo Kabupaten Gresik)*”. Dalam penelitian ini menjelaskan pengembangan sektor pariwisata pada obyek wisata religi Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim meliputi yang pertama pengembangan obyek dan daya tarik wisata berupa pemugaran gapuro dimana gapuro tersebut merupakan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi. Beberapa dampak pengembangan pariwisata dalam kehidupan masyarakat sekitar adalah dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial yang terjadi setelah adanya pengembangan obyek wisata religi Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim yaitu pertama meningkatnya keterampilan masyarakat

³³ Anita Sulistiyaning Gunawan, “*Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi pada Wisata Religi Gereja Puhsarang Kediri)*” *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 32 No. 1 (2016), 07. Diakses pada 19 Oktober 2019. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+analisis+pengembangan+pariwisata+terhadap+sosial+ekonomi+masyarakat&oq=jurnal+analisis+pengembangan+pariwisata+terhadap+sosial+ekonomi+mas#d=gs

sekitar dalam membuat souvenir, seperti pengrajin songkok ada pengrajin sarung dan pengrajin tasbih. Dampak transformasi struktur mata pencaharian, masyarakat yang dulunya menganggur sekarang bisa membuka usaha, adapun yang dulunya bekerja di industri sekarang juga mulai buka usaha sendiri dengan berjualan makanan dan minuman maupun souvenir dan pernak-pernik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pengembangan, wisata religi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dampak dari pengembangan wisata religi Makam Sunan Mulana Malik Ibrahim yaitu pada aspek pengembangan Obyek Daya Tarik adanya pemugaran gapura, bagian saran dan prasarana berupa pembangunan aula, pihak yayasan Makam Malik Ibrahim bekerjasama dengan pihak biro perjalanan, dan sumber daya manusia bekerja dengan penerapan SOP. Aspek sosial berupa transformasi norma, mata pencaharian dan dampak lingkungan. Aspek ekonomi yaitu, terjadi penerapan tenaga-kerja, mendorong aktifitas berwirusaha, dan meningkatkan pendapatan.³⁴

Hal yang paling mendasar yang membedakan penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan adalah terletak pada obyek dan subyek penelitiannya. Karya skripsi peneliti berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wisata religi di Desa Landoh Kec. Kayen, Kab. Pati, sedangkan artikel Muhammad Fahrizal Anwar berfokus pada Dampak Pengembangan Wisata Religi Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim Dalam Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Sekitar (Studi pada Kelurahan Gapurosukolilo Kabupaten Gresik). Selain itu tujuan pembahasan masalah juga berbeda dalam penelitian tersebut.

³⁴ Muhammad Fahrizal Anwar dkk, “Analisis Dampak Pengembangan Wisata Religi Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim Dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Sekitar (Studi pada Kelurahan Gapurosukolilo Kabupaten Gresik)”, Jurnal Administrasi Bisnis Vol.44 No.1 (2017) 191. . Diakses pada 17 Oktober 2019. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/article.view/1744>

3. Penelitian yang ditulis oleh M. Madyan dkk, dalam jurnal. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 7 No. 2 (2015), dengan judul “*Dampak Ekonomi Wisata Religi (Studi Kasus Kawasan Wisata Sunan Ampel Surabaya)*”. Dalam penelitian ini menjelaskan adanya obyek wisata religi Masjid Sunan Ampel memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dampak ekonomi langsung berupa pendapatan unit usaha yang berasal dari pengeluaran wisatawan dilokasi wisata, yaitu sebesar 44%. Dampak ekonomi tidak langsung berupa pendapatan yang diterima tenaga kerja, yaitu sebesar 8,2% dan dampak lanjutan berupa pengeluaran tenaga kerja di lokasi wisata yang sebagian besar habis digunakan untuk kebutuhan pangan. Sedangkan hal yang dapat disarankan bagi pedagang adalah gaji yang dikeluarkan untuk tenaga kerja masih tergolong rendah. Bagi pemerintah, kondisi lokasi masjid Sunan Ampel Surabaya yang tidak tertata dengan baik membuat lokasi wisata terlihat kumuh, diharapkan pemerintah dapat melakukan tata ulang tempat wisata agar indah dipandang tanpa harus merombak Masjid Sunan Ampel yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya.³⁵
- Hal yang paling mendasar yang membedakan penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan adalah terletak pada obyek dan subyek penelitiannya. Karya skripsi peneliti berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wisata religi di Desa Landoh Kec. Kayen, Kab. Pati, sedangkan artikel M. Madyan berfokus pada dampak ekonomi wisata religi (Studi Kasus Kawasan Wisata Sunan Ampel Surabaya) yang berlokasi di Kecamatan Ampel, Kabupaten Semampir, Surabaya. Selain itu tujuan pembahasan masalah juga berbeda dalam penelitian tersebut.

³⁵ M. Madyan dkk, “*Dampak Ekonomi Wisata Religi (Studi Kasus Kawasan Wisata Sunan Ampel Surabaya)*” Surabaya, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol.7 No.2 (2015), 105. Diakses pada 20 Oktober 2019. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+dampak+ekonomi+wisata+religi+studi+kasus+kawasan+wisata+sunan+ampel&oq=jurnal+dampak+ekonomi+wisata+religi+studi+kasus+kawasan+wisata+sunan+ampe#d=gs

4. Penelitian yang ditulis oleh Fulia Aji Gustaman dalam skripsi Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (UNNES) 2009 dengan judul *“Pengembangan Wisata Religi dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi (Kasus di Desa Kalak Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan)”*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Desa Kalak pada umumnya mempunyai aset wisata yang cukup besar. Hanya yang terjadi saat ini adalah aset-aset wisata yang belum berjalan secara maksimal dalam penelolan serta manajemen pemasaran wisata itu sendiri. Masyarakat sangat mendukung program pengembangan wisata religi di Desa Kalak. Masyarakat juga bersedia untuk diberdayakan guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Pemberdayaan masyarakat disini adalah masyarakat berwawasan wisata. Dimana dalam sebuah tempat/lokasi wisata, masyarakat harus dapat betul-betul memahami arti menjaga image tempat/lokasi wisata itu sendiri. Bentuk pemberdayaan masyarakat disini diantaranya: sosialisasi pelatihan- pelatihan, menumbuhkan semangat wirausaha dan mencetak produk-produk unggulan. Tetapi dalam perjalanan program ini akan mengalami hambatan diantaranya, minimnya pengetahuan masyarakat tentang wisata, jauhnya obyek wisata dari pusat kota, sarana transformasi dan telekomunikasi yang kurang memadai dan keterbatasan anggaran dana pemerintah Desa Kalak untuk mengembangkan program pengembangan wisata religi dan pemberdayaan masyarakat Desa Kalak.³⁶ Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat pengembangan wisata religi dan pemberdayaan masyarakat bagi peningkatan kehidupan sosial ekonomi yang berada di Desa Kalak

³⁶ Skripsi, Fulia Aji Gustaman, *“Pengembangan Wisata Religi dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi (Kasus di Desa Kalak Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan) (skripsi)”*(Universitas Negeri Semarang, 2009). Diakses pada 10 Januari 2020

Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan peneliti lakukan terletak pada rumusan masalah, tujuan, dan hasil penelitian. Perbedaan ini sangat menonjol karena peneliti dalam karya skripsi berfokus untuk menjelaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wisata religi makam Syekh Jangkung yang berlokasi di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

5. Penelitian yang ditulis oleh Denita Octavia Sidabukke dalam skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung 2018 dengan judul *“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Objek Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) (Studi pada Objek Wisata Bukit Pongan Di Desa Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)”*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penerapan community based tourism sudah diterapkan diketahui dari adanya partisipasi masyarakat untuk ambil bagian dalam pengembangan, adanya upaya keberlanjutan lingkungan serta pengembangan sumber daya manusia yang terlibat meskipun dalam pengembangan sumber daya manusia belum seutuhnya diterapkan dikarenakan masih berfokus pada pembangunan objek wisata bukit pongan, sehingga pengembangan sumber daya manusia yang terlibat masih bersifat otodidak. Dampak dari pengembangan objek wisata Bukit Pongan terhadap perekonomian masyarakat dapat dilihat dari adanya dana untuk pengembangan kelompok Karang Taruna sebedar 10% dari hasil Bukit Pongan, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dimana para anggota Karang Taruna yang terlibat bekerja di Bukit Pongan serta masyarakat sekitar yang dapat berdagang di Bukit Pongan. Dalam pengembangan wisata masih terdapat beberapa hambatan yaitu dari faktor internal yaitu minimnya pengetahuan sumber daya manusia, sehingga tidak mudah menerima masukan serta adanya anggota kelompok yang kurang disiplin.

Adapun faktor penghambat eksternal kondisi Bukit Pongonan dan cuaca karena jika hujan akses menuju lokasi wisata Bukit Pongonan sulit.³⁷

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat dalam penerapan *community based tourism* di Bukit Pongonan dalam pengembangan objek wisata Bukit Pongonan dan juga mengetahui dampak dari pengembangan objek wisata Bukit Pongonan terhadap perekonomian masyarakat. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan peneliti lakukan terletak pada rumusan masalah, tujuan, dan hasil penelitian. Perbedaan ini sangat menonjol karena peneliti dalam karya skripsi berfokus untuk menjelaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wisata religi makam Syekh Jangkung yang berlokasi di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

Dengan demikian, dari kelima kajian pustaka diatas, peneliti sudah menunjukkan perbedaan dan titik fokus penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu melanjutkan penelitian terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wisata religi Makam Syekh Jangkung yang dilakukan di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Dalam hal ini peneliti berfokus pada

C. Kerangka Berfikir

Menurut Slamet pemberdayaan masyarakat yaitu bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Maksud dari mampu disini adalah berdaya, paham, termotivasi, memiliki peluang, melihatnya dan memanfaatkannya, berenergi, mampu bekerjasama, berpengetahuan, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai inisiatif. Di desa Landoh terdapat makam yang dikenal dengan Makam Syekh

³⁷ Skripsi, Denita Octavia Sidabukke “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Objek Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) (Studi pada Objek Wisata Bukit Pongonan Di Desa Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)(skripsi)” (Universitas Lampung, 2018). Diakses pada 10 Januari 2020

Jangkung. Dengan adanya makam tersebut bisa meningkatkan ekonomi masyarakat disekitar makam. Tanggapan, sikap serta perilaku masyarakat dengan mengadakan peringatan haul setiap bulan Rajab dan berziarah dimakam setiap hari kamis. Dengan adanya Makam Syekh Jangkung ini sangat memberi dampak yang baik bagi masyarakat dan bisa meningkatkan ekonomi disekitar makam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan ekonomi masyarakat sekitar setelah berdirinya Makam Syekh Jangkung. Tentunya pemberdayaan ini dapat menjadikan masyarakat Desa Landoh menjadi berdaya dan mandiri. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dijelaskan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

